



## Manfaat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak dan Bagi Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan

Dwi Aprilia<sup>1</sup>, Norman Duma Sitinjak<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

### Abstrak

Ketepatan waktu WP dalam membayar dan melapor pajak sangat penting bagi pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini menguji pengaruh penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan pertumbuhan jumlah WP terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan jika penerbitan STP berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan dan pertumbuhan jumlah WP terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Selatan. Implikasi penelitian adalah KPP Pratama Malang Selatan harus lebih berupaya mengingatkan WP agar tepat waktu dalam membayar dan melapor pajak.

**Kata kunci** : Surat Tagihan Pajak; Pertumbuhan WP; Pajak Penghasilan.

### 1. Pendahuluan

Indikasi besaran penerimaan pajak dapat diketahui dari *tax ratio*. *Tax ratio* suatu negara yang rendah menunjukkan penerimaan pajak Negara tersebut masih rendah. Indonesia pada tahun 2018 memiliki *tax ratio* sebesar 10,3% dan tergolong rendah. Untuk Indonesia angka yang ideal adalah sebesar 15%. Agar *tax ratio* meningkat maka jumlah dan kepatuhan WP terutama WP badan harus ditingkatkan. Salah satu upaya agar ketidakpatuhan WP dalam membayar utang pajak dan pelaporan pajak dapat diatasi adalah dengan penerbitan surat tagihan pajak (STP).

Penggunaan sistem *self assessment* diharapkan untuk membantu WP dalam kewajiban pajak, namun demikian sistem yang dipilih bagaikan pisau bermata dua. Pada sisi yang lain, WP memanfaatkan *self assessment* dengan tidak bertanggungjawab sehingga utang pajak tidak dibayar tepat waktu.

Selain ketepatan waktu WP dalam memenuhi kewajiban pajak, pertumbuhan jumlah WP terdaftar sangat penting agar *tax ratio* Indonesia mengalami peningkatan. Penerbitan STP dan pertumbuhan WP sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Di Kota Malang ada beberapa KPP, salah satunya adalah KPP Pratama Malang Selatan yang diharapkan juga ikut dalam peningkatan ketaatan WP.

Berdasarkan uraian di atas maka judul yang diangkat pada penelitian ini adalah manfaat pertumbuhan jumlah WP dan STP bagi penerimaan PPh dengan lokasi penelitian adalah KPP Pratama Malang Selatan.

## **2. Kajian Teori**

### **Pajak**

KUP yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari orang pribadi (OP) dan badan kepada negara yang diatur UU, dan OP serta badan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta pajak digunakan oleh negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Jelas bahwa pajak memaksa WP untuk membayar utang pajak karena pajak didasarkan UU namun WP tidak mendapat kontribusi langsung dari dana pajak karena pajak digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan operasional untuk peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia.

### **Wajib Pajak (WP)**

WP dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2009, terdiri dari OP dan badan yang memiliki hak dan kewajiban pajak. Kewajiban WP diantaranya adalah membayar dan melapor pajak tepat pada waktunya.

### Surat Tagihan Pajak (STP)

STP dijelaskan dalam UU nomor 16 tahun 2009 adalah penagihan pajak atau/dan sanksi yang kepada WP dalam bentuk bunga atau/dan denda karena terlambat melakukan penyetoran pajak dan pelaporan SPT sehingga menyebabkan utang pajak. Keterlambatan berarti WP tidak memanfaatkan hak dengan benar dalam menghitung, menyetor pajak dan melaporkan SPT, untuk itu DJP menagih pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP tidak begitu saja diterbitkan, namun harus dilakukan penelitian atau setelah dilakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan.

### 3. Pembahasan

Pembahasan dimulai dari uji asumsi klasik dan dilanjutkan dengan analisis regresi. Uji Asumsi Klasik dan Uji Normalitas.

Hasil uji normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

		LN_Y	LN_X1	LN_X2
N		35	35	35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	24.6313	6.4061	11.2270
	Std. Deviation	.46861	.65991	.06695
Most Extreme Differences	Absolute	.147	.144	.074
	Positive	.147	.100	.074
	Negative	-.106	-.144	-.063
Test Statistic		.147	.144	.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.055 <sup>c</sup>	.065 <sup>c</sup>	.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data diolah 2019

Pada tabel 1 diketahui hasil uji non parametik, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) variabel penerbitan surat tagihan pajak sebesar 0,065, pertumbuhan WP terdaftar 0,200, dan penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,055 yang menunjukkan tingkat signifikan diatas 0,05 sehingga menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

### Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 2 angka *Durbin Waston* sebesar 1,958.

Tabel 2 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.610 <sup>a</sup>	.372	.333	.38271	1.958

a. Predictors: (Constant), LN\_X2, LN\_X1

b. Dependent Variable: LN\_Y

Sumber : Data diolah 2019

Menggunakan sampel sejumlah 35 dan 2 variabel *independen* ( $n=35$  dan  $k=2$ ), menunjukkan nilai  $d_{tt} = 1,5838$  dan  $d_L = 1,3433$ . Dari uji autokorelasi di atas menunjukkan bahwa  $1,5838 \leq 1,958 \leq (4 - 1,5838)$ . Model regresi yang dibangun dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi.

### Uji Multikolonieritas

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan tentang multikolonieritas.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-25.930	11.877		-2.183	.036					
	LN_X1	-.270	.110	-.380	-2.455	.020	-.097	-.398	-.344	.819	1.220
	LN_X2	4.658	1.083	.665	4.300	.000	.504	.605	.602	.819	1.220

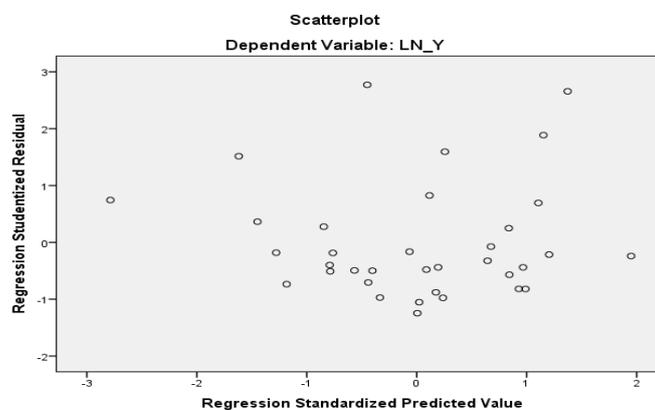
a. Dependent Variable: LN\_Y

Sumber : Data diolah 2019

Semua nilai VIF dibawah 10 sehingga model regresi yang dibangun tidak menunjukkan gejala multikolonieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1 menjelaskan tentang heteroskedastisitas. Tidak terdapat pola tertentu pada grafik.



Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas grafik *Scatterplot*

## Analisis Regresi

Setelah lolos asumsi klasik dilakukan analisis regresi. Analisis regresi dimulai dari uji simultan.

Nilai statistik F

Berdasarkan hasil uji secara simultan pada tabel 4 dapat dijelaskan bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen karena nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ .

Tabel 4 Hasil Uji Nilai Statistik F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.779	2	1.390	9.488	.001 <sup>b</sup>
	Residual	4.687	32	.146		
	Total	7.466	34			

a. Dependent Variable: LN\_Y  
b. Predictors: (Constant), LN\_X2, LN\_X1

Sumber : Data diolah 2019

## Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 5 variabel STP mempunyai nilai signifikansi 0,020 sehingga dapat dijelaskan bahwa penerbitan STP mengurangi penerimaan PPh. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rohmawati (2012).

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-25.930	11.877		-2.183	.036
	LN_X1	-.270	.110	-.380	-2.455	.020
	LN_X2	4.658	1.083	.665	4.300	.000

a. Dependent Variable: LN\_Y

Sumber : Data diolah 2019

STP dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak karena semakin banyak STP yang diterbitkan berarti semakin banyak WP yang tidak patuh sehingga penerimaan PPh di KPP Pratama Malang Selatan berkurang. Data STP dalam penelitian ini adalah jumlah STP yang diterbitkan, bukan penerimaan hasil

dari penerbitan STP. Dapat juga dijelaskan bahwa WP yang membayar pajak dan melaporkan SPT tidak tepat pada waktu merupakan WP yang memiliki kontribusi besar bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan, baik WP OP dan WP badan.

Pertumbuhan WP terdaftar mempunyai taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0.000 menunjukkan jumlah pertumbuhan WP terdaftar meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hakim dan Nangoi (2015). Semakin besar pertumbuhan WP maka semakin besar juga penerimaan pajak. Pertumbuhan WP yang semakin besar berdampak terhadap semakin banyak jumlah WP terdaftar, dan hal ini akan memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap penerimaan pajak.

#### **4. Kesimpulan**

Penerbitan STP menunjukkan penerimaan pajak penghasilan yang semakin kecil karena semakin banyak STP yang diterbitkan berarti semakin banyak WP yang tidak patuh. Jumlah pertumbuhan WP terdaftar meningkatkan penerimaan pajak. Pertumbuhan WP yang semakin besar berarti semakin besar juga jumlah WP terdaftar. Jumlah WP yang semakin banyak akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Selatan.

#### **5. Keterbatasan**

Keterbatasan penelitian ini yaitu:

- a. Data hanya tiga tahun pengamatan yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018.
- b. Variable independen pada penelitian ini hanya dua, yaitu STP yang diterbitkan dan pertumbuhan WP. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengikutsertakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat inflasi.
- c. Penelitian ini tidak membedakan WP OP dan WP badan, diharapkan penelitian selanjutnya memisahkan antara WP OP dan WP badan.

## Daftar Pustaka

Fauzia, M. (2018). "IMF: Indonesia Seharunya Punya "Tax Ratio" 15 Persen." Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019. melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/04/193900426/imf--indonesia-seharunya-punya-tax-ratio-15-persen>

Ghozali, I. (2016). "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS." Edisi 8. Semarang. Penerbit: Universitas Diponegoro.

Hakim dan Nangoi. (2015). "Analisis Penerapan PP. No.46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan WP Dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) Pada KPP Pratama Manado." *Jurnal EMBA*, 3(1): 787-795

James, S. dan Alley, C. (2004). "Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration." *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2): 27-42  
Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit : Andi.

Nareswari N. Y. Dan Sitinjak N. D. (2019) "Gross Up Bermanfaat Dalam Tax Planning?" *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1(1):26-33

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). "UU Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara perpajakan,"

Rohmawati, A. N. dan Rasmini, N. K. (2012). "Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WP Orang Pribadi." *e-Jurnal Akuntansi*, 1(2):1-17.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.